

***IMPLEMENTATION OF THE SELECTIVE POLICY ON THE USE OF
AUTOGATE AT SOEKARNO-HATTA IMMIGRATION CHECKPOINT
BASED ON GEORGE C. EDWARDS III'S IMPLEMENTATION THEORY***

Amanda Rizkya Alexandra* and Agustinus Supriyanto**

ABSTRACT

This research aims to analyze the obstacles faced in the immigration inspection process using autogate at Soekarno-Hatta Airport Immigration Checkpoint and to evaluate the compatibility between the implementation of the autogate system and the selective policy principle as regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, by examining legal, institutional, and practical implementation aspects.

This research is normative-empirical in nature. Primary data was obtained from autogate officers, supervisors at the Immigration Checkpoint, immigration officials at the Directorate of Immigration Information Technology, and foreign users of autogate, while secondary data was obtained through legislation, scientific studies, and legal dictionaries. Data obtained from field studies and literature studies were analyzed qualitatively, using George C. Edwards III's theory as an analytical tool, and conclusions were drawn inductively.

The research results indicate that the obstacles in implementing autogate are not only technical but also include policy communication barriers, limitations in human and technological resources, weak executor disposition, and an unintegrated bureaucratic structure. Autogate only performs data verification and is not yet capable of replacing the inspection function that is the core of selective policy, such as behavioral checks, analysis of arrival purposes, and identification of potential visa abuse. This research concludes that the current use of autogate is not yet aligned with selective policy, as the system's orientation leans more towards service efficiency rather than fulfilling substantive supervisory functions. The research recommends tightening visa issuance, providing regular training and socialization to officers, conducting routine evaluations every quarter, and for future researchers to develop comparative studies with other countries regarding autogate and selective policy.

Keywords:

Autogate, Selective Policy, Immigration Law, Implementation, Soekarno-Hatta Airport

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta),
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email:
amandarizkyaalexandra@mail.ugm.ac.id

** Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta. Email: agustinus.supriyanto@ugm.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELEKTIF TERHADAP PENGGUNAAN *AUTOGATE* DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI SOEKARNO HATTA BERDASARKAN TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GEORGE C. EDWARDS III

Amanda Rizky Alexandra* dan Agustinus Supriyanto**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses pemeriksaan keimigrasian menggunakan *autogate* di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan untuk mengevaluasi kesesuaian antara penerapan sistem *autogate* dengan prinsip kebijakan selektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan menelaah aspek hukum, kelembagaan, dan implementasi praktis.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Cara memperoleh data primer dari petugas *autogate*, supervisor di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, pejabat imigrasi di Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian, dan orang asing pengguna *autogate*, sedangkan data sekunder diperoleh melalui perundang-undangan, kajian ilmiah dan kamus hukum. Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi pustaka dianalisis secara kualitatif yang mana teori George C. Edwards III sebagai alat analisis dan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala implementasi *autogate* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup hambatan komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, lemahnya disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang belum terintegrasi. *Autogate* hanya melakukan verifikasi data dan belum mampu menggantikan fungsi pemeriksaan yang menjadi inti *selective policy* seperti pemeriksaan perilaku, analisis tujuan kedatangan, dan identifikasi potensi penyalahgunaan izin tinggal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan *autogate* saat ini belum sejalan dengan *selective policy*, karena orientasi sistem lebih condong pada efisiensi pelayanan daripada pemenuhan fungsi pengawasan substantif. Penelitian merekomendasikan memperketat penerbitan visa, memberikan pelatihan dan sosialisasi secara rutin kepada petugas, mengadakan evaluasi rutin secara berkala setiap triwulan dan untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan studi komparatif dengan negara lain mengenai *autogate* dan *selective policy*.

Kata kunci:

Autogate, *Selective Policy*, Keimigrasian, Digitalisasi.

- * Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: amandarizkyaalexandra@mail.ugm.ac.id
- ** Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Email: agustinus.supriyanto@ugm.ac.id